

KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

Oleh Suwardjoko Warpani

Dengan menyimak hasil sensus tahun 1990 dan tahun-tahun sebelumnya, dapat kita lihat bagaimana potret kependudukan Indonesia di masa lampau hingga sekarang. Berdasarkan gambaran tersebut, banyak hal yang dapat kita pertanyakan misalnya selain bertambah banyak apa pula maknanya bagi perkembangan daerah di Indonesia., sejauhmana desentralisasi pembangunan ke luar Jawa mampu menarik penduduk / meningkatkan penyebaran penduduk. Selain hal tersebut sudah adakah rencana kependudukan di Indonesia ?

Pendahuluan

Penduduk adalah "sumber persoalan". Tidak keliru, apabila kita melihatnya dari sisi kewajiban menyediakan ruang kehidupan dan penghidupan bagi seluruh penduduk. Negara Indonesia yang berupa kepulauan dengan lebih dari 13 ribu pulau, berpenduduk hampir 180 juta jiwa memang dihadapkan pada persoalan kependudukan yang pelik dan rumit. Jumlah yang amat banyak, persebaran yang tidak merata, mutu yang belum sebagaimana diinginkan untuk menunjang setiap derap langkah pembangunan, memang merupakan masalah yang tidak sederhana penanganannya. Dari sisi lain, penduduk dapat dipandang sebagai suatu "potensi" atau "sumber kekuatan" pembangunan, karena pemecahan segala persoalan bertumpu pada kemampuan penduduk sebagai sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas. Kesadaran kedua menuntut kita langkah pengelolaan yang tepat sehingga penduduk benar-benar dapat terwujud menjadi potensi pembangunan.

Di awal Pembangunan Jangka Panjang Tahap I, kita bangsa Indonesia yang sudah 21 tahun merdeka dan memasuki orde baru, beranggapan bahwa persebaran penduduk di Indonesia "tidak benar", tidak merata. Berdasarkan kondisi tersebut maka, harus ada upaya untuk pemeratakan persebaran penduduk dengan upaya transmigrasi, namun sayang upaya tersebut sering

"dimentahkan" oleh kebijaksanaan lain yang kurang tanggap atas perilaku kependudukan.

Dengan menyimak hasil sensus 1990, kita melihat potret kependudukan Indonesia yang kita sendiri mempertanyakan apa bedanya dengan potret 30 tahun yang lampau. Selain bertambah banyak, apa pula maknanya bagi perkembangan daerah di Indonesia. Sudah adakah rencana kependudukan Indonesia ?

Kependudukan Indonesia

Pertambahan Penduduk

Apabila kita simak laju pertambahan penduduk dalam tiga kurun waktu sensus maka tampak sekali terjadi kenaikan jumlah penduduk di sejumlah propinsi sementara di propinsi lain terjadi penurunan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran persebaran penduduk, mengingat bahwa penurunan laju pertambahan penduduk terjadi pada propinsi-propinsi yang proporsi jumlah penduduknya relatif tinggi.

Penyimpangan terjadi di Propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, dengan jumlah penduduk yang relatif besar, justru laju pertambahan penduduknya menunjukkan gejala naik. Perkembangan metropolitan Jabotabek di Jawa Barat dan

• Suwardjoko Warpani, adalah Staf Pengajar Jurusan Teknik Planologi, FTSP Institut Teknologi Bandung, serta Pembantu Asisten Menteri KLH Bidang Permukiman.

Gerbangkertasusila di Jawa Timur tampaknya mempunyai saham yang amat berarti.

Penyimpangan lain terjadi di Propinsi Maluku dengan jumlah penduduk sedikit, laju pertumbuhan penduduknya terus menurun. Jadi tampaknya Propinsi Maluku tidak menjadi pilihan bagi para migran melainkan sebaliknya banyak migran berasal dari Propinsi Maluku, atau mobilitas penduduk Propinsi Maluku sangat tinggi; tetapi data perhubungan tidak menunjang ke arah kesimpulan ini.

Dalam kurun waktu 1961-1971 laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 2,1 %/th. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah di Propinsi Lampung yaitu 5,29 %/th, sedangkan yang terendah adalah DI Yogyakarta, 1,07 %/th. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Propinsi Lampung tampaknya erat kaitannya dengan kenyataan bahwa daerah tujuan transmigrasi adalah Lampung.

Dalam kurun waktu 1971-1980 laju pertumbuhan penduduk Lampung masih tertinggi (5,77 %/th), namun Kalimantan Timur pun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat (5,73 %/th), sedangkan DI Yogyakarta masih menunjukkan laju pertumbuhan terendah (1,10 %/th). Propinsi lain yang menunjukkan laju pertumbuhan pesat adalah Bengkulu (4,39 %/th) dibandingkan dengan laju pertumbuhan 1961-1971 yang 2,51 %/th.

Pada akhir Oktober 1990, jumlah penduduk Indonesia adalah 179,3211,641 jiwa, dan pada akhir 1990 ditaksir berjumlah 180 juta jiwa. Sensus penduduk 1980 mencatat jumlah penduduk sebanyak 147.490.298 jiwa. Jadi selama 10 tahun jumlah penduduk Indonesia telah bertambah sebanyak 31.831.343 jiwa; 16.304.221 jiwa di antaranya, atau 51,22 % adalah tambahan penduduk di P.Jawa.

Salah satu hasil sensus penduduk 1990 yang menarik adalah turunnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari 2,32 %/tahun dalam kurun 1971-1980 menjadi 1,92 % / tahun dalam kurun 1980- 1990. Penurunan tersebut terjadi di semua propinsi kecuali Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu di Indonesia Bagian Barat, propinsi di Indonesia Bagian Tengah yang menunjukkan laju pertumbuhan tinggi adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, sementara di Indonesia Bagian Timur adalah Propinsi Sulawesi Tenggara dan Irian Jaya. DI Yogyakarta tetap bertahan pada laju pertumbuhan terendah, bahkan juga turun, yakni 0,57 %/th; sedangkan yang tertinggi bergeser ke Propinsi Irian Jaya dengan angka spektakuler, 8,41 %/th, sementara terjadi penurunan tajam di Propinsi Lampung (2,65 %/th). Di masa duapuluhlima tahun yang akan datang, dengan keberhasilan KB, dapat dipastikan laju pertumbuhan penduduk akan menurun lagi.

Persebaran Penduduk Indonesia

Tahun 1961

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1961 adalah 97.085.348 jiwa. Dari jumlah itu sebanyak 63 juta (64,95%) tinggal di P.Jawa yang luasnya hanya 6 % dari luas seluruh daratan Indonesia. Propinsi Jawa Timur ternyata menampung jumlah yang terbesar yaitu 21.823.020 jiwa atau 22,48 % dari jumlah seluruh penduduk Indonesia ketika itu. Jumlah tersekit ada di Propinsi Bengkulu yaitu sebanyak 406.249 jiwa atau 0,42%.

Apabila dibandingkan dengan luas wilayah administrasinya, maka DKI Jakarta adalah yang terpadat (5.040 jiwa/Km²), sedangkan yang terjarang penduduknya adalah Propinsi Irian Jaya (2 jiwa/Km²).

Tahun 1971

Tahun 1971, jumlah penduduk Indonesia meningkat menjadi 119.208.229 jiwa yang berarti bertambah sebanyak 22.122.881 jiwa selama 10 tahun, atau kenaikan rata-rata 2,10 % per tahun. Dari tambahan jumlah penduduk tersebut, sebanyak 13.026.752 atau 58,88 % adalah tambahan penduduk P.Jawa.

Apabila dilihat persebaran proporsi penduduk di semua propinsi, maka selama 10 tahun dapat dikatakan tidak terjadi perubahan apa-apa. Artinya, propinsi yang padat penduduk adalah di P.Jawa dan hanya Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan yang berpenduduk agak banyak. Proporsi jumlah penduduk terbesar masih didominasi oleh propinsi-propinsi di P. Jawa, terutama Propinsi Jawa Timur (21,41 %). Terjadi penurunan prosentasi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara; sedangkan di pulau-pulau lain terjadi kenaikan.

Oleh karena secara mutlak pertumbuhan jumlah penduduk di Jawa masih tetap terbesar, maka peningkatan kepadatan penduduk pun terjadi di Jawa. Akibatnya, dapat diduga terjadi banyak perubahan guna lahan di Jawa. Urbanisasi, perluasan kawasan terbangun, munculnya kawasan-kawasan permukiman baru, timbulnya kawasan industri, merupakan bukti pesatnya perubahan fisik Pulau Jawa.

Tahun 1980

Sensus 1980 mencatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 147.490.298 jiwa, yang berarti naik sebanyak 28.282.069 jiwa atau rata-rata 2,32 % per tahun. Dari jumlah itu 15.183.201 jiwa atau 53,68 % adalah pertumbuhan penduduk P.Jawa. Laju pertumbuhan-



penduduk tertinggi adalah Propinsi Lampung dan Kalimantan Timur.

Pada tahun 1980, proporsi penduduk P.Jawa adalah 61,88 %. Apabila proporsi ini diikuti, maka pertambahan penduduk P.Jawa seharusnya sebanyak

17.500.944 jiwa. Maka dapat dianggap ada arus penduduk keluar P.Jawa sebanyak 2.317.743 jiwa dalam kurun waktu 1971-1980.

Pada tahun 1980 sebaran proporsi penduduk per propinsi masih tetap belum berubah, sama seperti tahun 1961 dan 1971, meskipun Timor Timur sudah menjadi bagian Republik Indonesia. Meskipun angkanya menurun, proporsi jumlah penduduk Propinsi Jawa Timur tetap yang tertinggi.

Tahun 1990

Tahun 1990, jumlah penduduk Indonesia meningkat menjadi 179.321.641 jiwa (Okt.1990), dan pada akhir tahun 1990 diperkirakan berjumlah 180.000.000 jiwa yang berarti bertambah sebanyak kira-kira 32.500.000 jiwa selama 10 tahun, atau kenaikan rata-rata 1,97 % per tahun. Dari tambahan jumlah penduduk tersebut, lebih kurang sebanyak 16.500.000 jiwa atau 50 % adalah tambahan penduduk P.Jawa. Tampaknya tambahan jumlah penduduk sebanyak itu bagi P.Jawa masih proporsional mengingat pada th.1990 penduduk P. Jawa adalah 59,99 %. Apabila prosentasi ini diikuti, maka tambahan penduduk P.Jawa seharusnya adalah 9.898.350 jiwa. Dengan anggapan itu maka berarti ada arus penduduk keluar P.Jawa sebanyak kira-kira 6.600.000 jiwa dalam kurun waktu 1981-1990.

Dilihat persebaran proporsi penduduk di semua propinsi, maka selama 30 tahun dapat dikatakan tidak terjadi perubahan apa-apa, bahkan peran Sulawesi Selatan menurun. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah propinsi, maka kepadatan penduduk yang tinggi adalah propinsi-propinsi di P.Jawa dan Bali, bahkan kepadatan penduduk DKI Jakarta sudah mendekati angka 14.000 jiwa per Km².

Propinsi-propinsi di luar Jawa yang kepadatan penduduknya lebih dari 100 jiwa per Km² adalah Sumatera Utara (145), Lampung (180), Bali (500), Nusa Tenggara Barat (167), dan Sulawesi Utara (130); kepadatan penduduk propinsi-propinsi lain masih di bawah 100 jiwa per Km², bahkan Irian Jaya hanya 4 jiwa/Km².

DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, meskipun tampaknya menampung prosentasi jumlah penduduk sedikit (kurang

dari 5 %), kepadatannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan semua propinsi yang lain. Propinsi di luar Jawa yang menampung penduduk sekitar 5 % dari seluruh penduduk Indonesia hanya Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Dua propinsi yang relatif sudah berkembang.

Ketimpangan persebaran penduduk Indonesia ternyata pula menjadi salah satu sebab ketimpangan perkembangan daerah. Sumber daya alam (SDA) di luar Jawa belum seluruhnya termanfaatkan dan bahkan mungkin banyak yang belum diketahui. Tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja masih langka, proporsi tenaga kerja terlatih dan terdidik masih amat rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja.

Persebaran penduduk memang tidak mungkin sama rata mengingat sumber daya alam (SDA), sebagai sumber penghidupan, tersebar tidak merata di muka bumi ini, sehingga ada daerah yang berpenduduk banyak/padat dan ada pula yang sedikit/jarang. Kemajuan teknologi dan kerakayaan telah mampu meningkatkan daya tampung P.Jawa. Jadi, persoalan utama bukan terletak pada banyaknya penduduk berada di P.Jawa melainkan "kurangnya" penduduk di pulau-pulau lain, baik kualitas maupun kuantitas, sehingga perkembangan daerah di luar P.Jawa relatif lebih lambat. SDA di luar P.Jawa cukup banyak dan beragam, namun belum dapat diolah karena kekurangan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengolah SDA tersebut.

Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi Daerah Tingkat II. Batasan ini menunjuk pada skala ruang pergerakan, hingga gerak keruangan yang berada dalam batas wilayah administrasi DT.II tidak dianggap sebagai mobilitas penduduk. Tanpa adanya skala waktu, maka setiap gerak keruangan penduduk, meskipun hanya beberapa saat, sejauh melewati batas administrasi DT.II termasuk kategori mobilitas.

Gerak keruangan penduduk dari desa ke kota atau migrasi desa-kota menyebabkan jumlah penduduk perkotaan bertambah dengan pesat hingga urbanisasi meningkat cepat. Keadaan ini telah menimbulkan banyak kawasan kumuh di daerah perkotaan yang menimbulkan banyak persoalan lingkungan, dan menjadi borok-borok kota yang harus disembuhkan. Perlu dicatat bahwa peningkatan urbanisasi yang terjadi di Indonesia bukan hanya karena meningkatnya jumlah penduduk daerah perkotaan yang ada, melainkan juga karena reklasifikasi

Penyebaran Penduduk

yaitu perubahan status sejumlah daerah perdesaan yang telah memenuhi kriteria perkotaan.

Mobilitas penduduk dapat pula digunakan sebagai tolok ukur kemajuan pembangunan. Makin maju pembangunan suatu daerah, maka mobilitas penduduknya pun makin tinggi; bahkan bisa terjadi arus migrasi masuk yang tinggi dari daerah perdesaan di sekitarnya. Namun, berdasarkan definisi mobilitas seperti tersebut di atas, maka tidak semua gerak penduduk desa-kota dapat dikategorikan sebagai mobilitas.

Sebenarnya banyaknya tambahan jumlah penduduk bagi P.Jawa masih proporsional mengingat pada th.1971 penduduk P.Jawa adalah 63,83 %. Apabila prosentasi ini diikuti, maka tambahan penduduk P.Jawa seharusnya adalah 14.121.035 jiwa. Dengan anggapan itu maka berarti ada arus penduduk keluar P.Jawa sebanyak 1.094.283 jiwa dalam kurun waktu 1961-1971.

Selama kurun waktu tersebut Departemen Transmigrasi telah berhasil memindahkan penduduk dari P.Jawa sebanyak 46.861 KK atau kira-kira 234.000 jiwa. Jadi ternyata ada sebanyak $(1.094.283 - 234.000) = 860.283$ jiwa nir-transmigran yang keluar dari P.Jawa. Angka ini hanya menunjukkan selisih keluar-masuk saja, belum mencerminkan mobilitas penduduk sebenarnya mengingat ada pula arus penduduk dari luar P.Jawa ke P.Jawa.

Selama kurun waktu 1971-1980 Departemen Transmigrasi telah berhasil memindahkan penduduk dari P.Jawa sebanyak 156.934 KK atau lebih kurang 785.000 jiwa. Jadi, berdasarkan pola pikir seperti di atas, ditaksir ada sebanyak $(2.317.743 - 785.000) = \pm 1.500.000$ jiwa nir-transmigran yang keluar dari P.Jawa. Perlu dicatat bahwa mobilitas-penduduk sebenarnya lebih besar dari itu, karena selama kurun waktu tersebut banyak penduduk yang keluar dan kemudian kembali lagi sehingga tercatat "tidak pindah" atau tidak melakukan pergerakan.

Selama kurun waktu 1981-1990 Departemen Transmigrasi telah berhasil memindahkan penduduk dari P.Jawa sebanyak 1.094.521 KK atau kira-kira 5.500.000 jiwa. Dengan cara seperti di atas diketahui sebanyak $(6.600.000 - 5.500.000) = 1.100.000$ jiwa nir-transmigran yang keluar dari P. Jawa.

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa migrasi ke luar Jawa sudah lama terjadi dalam jumlah yang cukup besar, tetapi yang masuk ke Jawa pun tidak sedikit. Alasan migrasi ke Jawa sangat beragam.

Penyebaran penduduk berarti pemukiman atau memindahkan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Pemukiman, selain berarti memukimkan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, berarti pula memukimkan penduduk yang hidup berpindah-pindah (nomade) ke permukiman tertentu sehingga penduduk itu menetap. Hal ini mungkin terjadi apabila permukiman yang baru menjanjikan menjadi tempat kehidupan dan penghidupan yang layak.

Sekarang penduduk P.Jawa berjumlah 107.573.749 jiwa, lebih dari 3,5 kali lipat daripada ketika awal program transmigrasi. Ini berarti program transmigrasi, meskipun telah berhasil memukimkan jutaan penduduk dari P.Jawa ke pulau lain, telah terbukti bukan obat mujarab atas ketimpangan persebaran penduduk. Kelemahan upaya penyebaran semacam ini mungkin terletak pada pemilihan transmigran yang berorientasi pada sektor pertanian.

SDA yang tersebar di seluruh nusantara perlu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Indonesia, dengan tetap berpedoman pada pembangunan berwawasan lingkungan. Untuk itu maka penyebaran penduduk dalam arti kuantitatif, kualitatif, dan keruangan, perlu dan harus menjadi bagian dari **Perencanaan Kependudukan**. Dengan demikian, penyebaran penduduk dengan pola transmigrasi tidak dapat lagi mengandalkan pada sektor pertanian (dalam arti sempit: persawahan) saja melainkan harus memasukkan sektor industri dan jasa. Sistem target transmigran cenderung mementingkan jumlah daripada mutu yang sesuai dengan kebutuhan daerah tujuan transmigrasi. Akibatnya telah dirasakan kini bahwa komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan amat menguntungkan P.Jawa. Berbagai pola transmigrasi seperti pola jasa, kehutanan, industri, HTI, nelayan, telah dilakukan sebagai proyek perintis. Hal ini menunjukkan adanya keanekaragaman transmigran, namun masih perlu dikembangkan transmigrasi dan/atau migrasi yang mengarah pada perbaikan komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, di luar P.Jawa.

Pembangunan Daerah

Desentralisasi pembangunan ke luar Jawa telah terbukti mampu menarik sejumlah penduduk dengan tingkat pendidikan yang memadai. Dengan demikian, upaya penyebaran penduduk harus disertai kebijaksanaan desentralisasi pembangunan.

Potensi SDA di luar Jawa membutuhkan tenaga terdidik, terlatih, dan terampil untuk mengeksplotasi SDA bagi

kepentingan pembangunan nasional. Dengan kata lain, ada hubungan timbal balik antara pembangunan daerah tak dapat dilepaskan dari perencanaan kependudukan. Eksploitasi SDA, berarti pembangunan di wilayah SDA, diyakini akan menarik sejumlah penduduk untuk mengisi kesempatan kerja yang terbuka, bahkan sebagian daripadanya mungkin sekali menciptakan lapangan kerja sendiri. Tarikan atas penduduk akan lebih kuat lagi apabila ditunjang prasarana dan sarana perhubungan yang baik.

Perkembangan pembangunan daerah di luar Jawa terbukti telah mampu menggeser proporsi sebaran penduduk Indonesia, meskipun jumlah mutlakny masih tetap berada di P.Jawa. Propinsi-propinsi yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk tinggi ternyata adalah propinsi yang --selain menjadi daerah tujuan

transmigrasi--relatif pesat pembangunan daerahnya. Di luar Jawa, dapat disebut misalnya Propinsi Riau, Kalimantan Timur, Irian Jaya; sementara di Jawa adalah Propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Penelitian pola migrasi di Indonesia menunjukkan gejala pergeseran ke arah IBT sebagai akibat kebijaksanaan pembangunan daerah IBT. Gejala ini merupakan pertanda positif dilihat dari kacamata persebaran penduduk, apalagi bila para transmigran adalah tenaga-tenaga terampil, terlatih, dan terdidik. Hal ini terjadi misalnya pada daerah-daerah tempat SDA dieksploitasi seperti di Kalimantan Timur dan Irian Jaya. Kebijakan pemerintah mengarahkan orientasi pembangunan ke wilayah IBT dapat dipastikan akan mengubah arah migrasi penduduk, dan akan mengubah pula proporsi

PERTAMBAHAN PENDUDUK INDONESIA ANTARA 1961,1971,1980,1990

Kode Propinsi	Jumlah Penduduk dan % per propinsi								Laju pertumbuhan (%) rata-rata per tahun		
	Sensus 1961	%	Sensus 1971	%	Sensus 1980	%	Sensus 1990	%	61-71	71-80	80-90
11 Di. Aceh	1.628.983	1,68	2.008.595	1,68	2.611.271	1,77	3.415.875	1,90	2,14	2,93	2,72
12 Sumatera Utara	4.964.734	5,11	6.621.831	5,55	8.360.894	5,67	10.256.027	5,72	2,95	2,60	2,06
13 Sumatera Barat	2.319.057	2,39	2.793.196	2,34	3.406.816	2,31	3.999.120	2,23	1,90	2,21	1,62
14 Riau	1.234.984	1,27	1.641.545	1,38	2.168.535	1,47	3.306.215	1,84	2,92	3,11	4,31
15 Jambi	744.381	0,77	1.006.084	0,84	1.445.994	0,98	2.016.159	1,12	3,09	4,07	3,38
16 Sumatera Selatan	2.773.464	2,86	3.440.573	2,89	4.629.801	3,14	6.276.947	3,50	2,20	3,32	3,09
17 Bengkulu	406.249	0,42	519.316	0,44	768.064	0,52	1.179.122	0,66	2,51	4,39	4,38
18 Lampung	1.667.511	1,72	2.777.008	2,33	4.624.785	3,14	6.005.879	3,35	5,29	5,77	2,65
Sub Total	15.739.363	(16,21)	20.808.148	(17,46)	28.016.160	(19,00)	36.455.879	(20,33)			
31 DKI Jakarta	2.973.052	3,06	4.579.303	3,84	6.503.449	4,41	8.254.035	4,60	4,46	3,93	2,41
32 Jawa Barat	17.614.555	18,14	21.623.529	18,14	27.453.525	18,61	35.381.153	2,09	2,09	2,66	2,57
33 Jawa Tengah	18.407.471	18,96	21.877.136	18,35	25.372.889	17,20	28.521.692	1,76	1,76	1,64	1,18
34 DI Yogyakarta	2.241.477	2,31	2.489.360	2,09	2.750.813	1,87	2.913.054	1,07	1,07	1,10	0,57
35 Jawa Barat	21.823.020	22,48	25.516.999	21,41	29.188.853	19,79	32.503.815	1,59	1,59	1,49	1,08
Sub Total	63.059.020	(64,95)	76.086.327	(63,83)	91.269.528	(61,88)	107.573.749				
51 Bali	1.762.529	1,84	2.120.322	1,78	2.469.930	1,67	2.777.811	1,55	1,77	1,69	1,18
52 Nusa Tenggara Barat	1.807.830	1,86	2.203.465	1,85	2.724.664	1,85	3.369.649	1,88	2,02	2,36	2,15
53 Nusa Tenggara Timur	1.967.297	2,03	2.295.287	1,93	2.737.166	1,86	3.268.644	1,82	1,57	1,95	1,79
54 Timor Timur	-	-	-	-	555.350	0,38	747.750	0,42	-	-	3,02
Sub Total	5.557.656	(5,72)	6.619.074	(5,55)	8.487.110	(0,83)	10.163.854	(5,08)			
61 Kalimantan Barat	1.581.034	1,63	2.019.936	1,69	2.486.068	1,43	3.239.235	1,81	2,51	2,31	2,68
62 Kalimantan Tengah	496.522	0,51	701.936	0,59	954.353	0,65	1.396.334	0,78	2,56	3,43	3,88
63 Kalimantan Selatan	1.473.155	1,52	1.699.105	1,43	2.064.649	1,40	2.597.572	1,45	1,45	2,16	2,32
64 Kalimantan Timur	550.764	0,57	733.797	0,62	1.218.016	0,83	1.876.663	1,05	2,94	5,73	4,42
Sub Total	4.101.475	(4,22)	5.154.774	(4,32)	6.723.086	(4,56)	9.109.804				
71 Sulaesi Utara	1.310.054	1,35	1.718.543	1,44	2.115.384	1,43	2.478.793	1,38	2,78	2,31	1,60
72 Sulawesi Tengah	693.157	0,71	913.662	0,77	1.289.635	0,87	1.711.327	0,95	2,83	3,86	2,87
73 Sulawesi Selatan	4.516.544	4,65	5.180.576	4,35	6.062.212	4,11	6.981.646	3,89	1,40	1,74	1,42
74 Sulawesi Tenggara	559.594	0,58	714.120	0,60	942.302	0,64	1.349.619	0,75	2,49	3,09	3,66
Sub Total	7.079.349	(7,29)	8.526.901	(7,16)	10.409.533	(7,05)	12.521.385	(6,97)			
81 Maluku	789.534	0,81	1.089.565	0,91	1.441.006	0,96	1.856.075	1,04	3,31	2,88	2,78
82 Irian Jaya	758.396	0,78	923.440	0,77	1.173.875	0,80	1.641.430	0,92	2,01	2,67	3,41
Sub Total	1.547.930	(1,59)	2.013.005	(1,68)	2.584.881	(1,76)	3.497.505	(1,96)			
INDONESIA	97.085.930		119.208.229		147.490.298		179.321.641		2,10	2,32	1,97

Sumber : diolah dari data BPS 19161, 1971, 1990

sebaran penduduk, meskipun mungkin hanya sedikit mengubah prosentasi penduduk P. Jawa.

Persebaran penduduk tidak mungkin sama rata mengingat sumber daya alam (SDA), sebagai sumber penghidupan, tersebar tidak merata di muka bumi ini, sehingga ada daerah yang berpenduduk banyak/padat dan ada pula yang sedikit/jarang. Pada awal tahun enampuluhan daya dukung P.Jawa sudah menjadi bahan pemikiran serius. Kenyataannya, pada awal tahun sembilanpuluhan jumlah penduduk P.Jawa adalah dua kali lipat dibandingkan dengan keadaan 30 tahun sebelumnya.

Persoalan utama bukan terletak pada banyaknya penduduk berada di P.Jawa melainkan "kurangnya" penduduk di pulau-pulau lain, baik kualitas maupun kuantitas, sehingga perkembangan daerah di luar P.Jawa relatif lebih lambat. SDA di luar P.Jawa cukup banyak dan beragam, namun belum dapat diolah karena kekurangan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengolah SDA tersebut. Oleh karena itu perlu diupayakan peningkatan mutu dan jumlah penduduk di luar P.Jawa.

Penyebaran penduduk adalah suatu kebijaksanaan kependudukan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penyebaran penduduk dapat bersifat aktif maupun pasif. Aktif, apabila penyebaran tersebut terjadi atas kemauan sendiri dan dilakukan tanpa "bantuan" pihak tertentu (Pemerintah), jadi bersifat "spontan"; sedangkan pasif adalah apabila perpindahan tersebut diatur dan dikelola oleh Pemerintah, misalnya transmigrasi. Dalam hal ini, kedua sifat penyebaran penduduk tersebut dapat direkayasa.

Belajar dari pengalaman P.Jawa, maka upaya menyebarkan penduduk harus memperhitungkan atau mendasarkan kebijaksanaannya atas daya tampung dan daya dukung lingkungan. Ini berarti bahwa pembangunan di mana saja harus tetap berwawasan lingkungan. Sementara itu, upaya transmigrasi dengan berbagai polanya patut dikembangkan, baik menyangkut kelompok sasaran transmigran maupun daerah tujuan transmigrasi.

Daftar Pustaka

- Ananta, Aris dan Arifin, Evi Nurvidya; (1991). **Faktor Penentu Dinamika Kependudukan Indonesia di Masa Depan**, Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi - Universitas Indonesia
- Bintarto, R; (1983) **Urbanisasi dan Permasalahannya**, Ghalia Indonesia
- Departemen Transmigrasi; (1990): Laporan Bulanan No.9/2-V, Desember 1990
- Friedmann, John & Wulff, Robert; (1979): **The Urban Transition**, Edward Arnold
- Mamas, S.G.Made ; 1991: **Proyeksi Penduduk Indonesia Untuk Pelita VI 1994/1995-1998/1999**, Makalah, disajikan dalam Pertemuan Penjelasan Rujukan Prakiraan Awal Gambaran Kependudukan dalam Pelita VI, Sekretariat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- Ward, Barbara & Dubos, Rene; (1974): **Hanya Satu Bumi**, Lembaga Ekologi - Universitas Padjadjaran,
- Yomo, Wiryanto Dan Wehner, Gunter; (1973), **Membangun Masyarakat**, Alumni